

KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI DENGAN UNI EROPA PADA MASA PEMERINTAHAN RECEP TAYYIP ERDOGAN (TAHUN 2002-2010)

Fitri Nayana

Hp.: 08126850337

email: fifinayana@yahoo.com

Anggota: Indra Pahlawan S.IP., M.Si.

Abstract: *This research attempts to describe the Turkish Foreign Policy towards European Union during the reign of Recep Tayyip Erdogan in 2002 through 2010. Turkish foreign policy has undergone some significant changes. Turkish foreign policy doctrine adopt "Strategic Depth " formulated by the Turkish Foreign Minister, Ahmed Davutoglu which is significantly different from Turkish foreign policy before 2002.*

Researcher uses decision making theory by William D. Choplin .This research is descriptive qualitative research method that uses descriptive-explanatory. Datas in this research is taken from books, journals, internet, reports, ,and other references.

This research show that during the reign of Recep Tayyip Erdogan Turkish Foreign Policy is not only focus on Western States but also on Middle East which give it impact to Turkey's relations with European Union.

Keyword: Turkey, Foreign Policy, Turkish Foreign Policy, Recep Tayyip Erdogan, Strategic Depth, European Union.

Pendahuluan

Turki merupakan negara yang strategis berada di antara dua benua dan dua peradaban: Asia dan Eropa serta Timur dan Barat. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 km². 97% wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya berada di benua Eropa. Di Selatan, Turki berbatasan dengan Irak sepanjang 378 km dan 877 km dengan Siria. Di Barat, perbatasan dengan Yunani sepanjang 203 km dan 269 km dengan Bulgaria. Di sebelah Timur, sepanjang 529 km dengan Iran, 276 km dengan Georgia, 312 km dengan Armenia, dan 18 km dengan Azerbaijan. Turki dikelilingi oleh tiga lautan, yakni, laut Mediterania di Selatan, Laut Egean di Barat, dan Laut Hitam di sebelah Utara.¹

Pada masa lalu Turki dijuluki *The Sick Man in Europe* (orang sekarat) oleh Eropa karena kondisi kekhalifahan Turki yang penuh kekalahan, penyelewengan dan korupsi kemudian Mustafa Kemal melakukan serangkaian kudeta dan pembaharuan. Secara resmi Majelis Nasional Turki menghapus Kekhalifahan pada tahun 1922 kemudian dibawah pimpinan Mustafa Kemal Attaturk sejak tahun 1923 Turki berbentuk Republik Konstitusional yang demokratis, sekular, dan bersatu.

¹ Adam Balcer, *Heading for the Strategic Partnership EU-Turkey in the Foreign Policy, Turkey: a regional power in a strategic perspective, demosEUROPA – Centre for European Strategy*, Warsaw 2009, hlm.9.

Pada masa awal sebagai negara Republik Turki memiliki arah politik luar negeri yang cenderung dengan kekuatan besar di Eropa dan Amerika Serikat melalui hubungan kerjasama ekonomi. Turki tidak lagi melihat dirinya sebagai bagian dari Timur Tengah, dan melihat keterikatan hubungannya dengan Timur Tengah melalui kacamata posisinya sebagai rekan potensial bagi aliansi Barat. Selama abad ke-20 kebijakan luar negeri Turki fokus untuk menjalin hubungan terhadap dunia Barat

Pada tahun 1989 pasca runtuhnya Uni Soviet kebijakan utama luar negeri Turki adalah bergabung dengan Uni Eropa, tapi mayoritas negara-negara anggota Uni Eropa yang lain enggan untuk melakukan perluasan keanggotaan. Keinginan negara Turki menjadi salah satu anggota Uni Eropa selalu mendapat hambatan dari beberapa negara anggota Uni Eropa, penolakan dari beberapa negara anggota Uni Eropa ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Jumlah penduduk Turki yang besar (lebih dari 70 juta jiwa) akan menjadi beban yang besar bagi UE terutama dikhawatirkan ketika arus pekerja dibuka tanpa batas maka para pekerja dari Turki dikhawatirkan akan mendominasi di UE serta dikhawatirkan akan menjadi negara yang berpengaruh terhadap kebijakan fundamental di UE,
2. Jumlah penduduk miskin di Turki yang tinggi juga menjadi faktor penghambat, sekitar 35% penduduknya berkerja dibidang pertanian, serta pendapatan perkapita yang masih dibawah \$10.000 dan masih adanya jarak antara penduduk yang kaya dan miskin,
3. Wilayah geografi Turki yang langsung berbatasan dengan negara-negara di timur tengah seperti Irak, Iran dan Suriah dikhawatirkan akan menjadi sumber pemicu konflik UE dengan negara-negara dikawasan Asia khususnya Timur Tengah,
4. Pendekatan secara demografi bahwa Turki masih belum bisa dikatakan sebagai bangsa Eropa, masih adanya perbedaan mencolok secara kebudayaan dan agama menjadi pertimbangan UE untuk menolak keanggotaan Turki di UE.²

Kebijakan luar negeri Turki kemudian mengalami transformasi yang signifikan setelah kemenangan partai AKP (*Adalet ve Kalkinme Partisi* disingkat *AKP*) dalam kompetisi pemilu di Turki pada tahun 2002 dan 2007.³ *Adalet ve Kalkinme Partisi* didirikan oleh Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2001 dan langsung mendapat sambutan baik dari mayoritas rakyat Turki. *Adalet ve Kalkinme Partisi* memberikan corak baru dalam pemerintahan Turki partai ini beraliran konservatif-demokrat dengan pembangunan dan peningkatan ekonomi serta penegakan demokrasi sebagai agenda utama. Adanya nuansa Islam dalam pandangan dan program-program kepartaian partai ini menjadikannya sorotan terutama oleh kubu sekuler Turki. Kebijakan Recep Tayyip Erdogan dianggap mengalami pergeseran dari pemerintahan sebelumnya, di mana nuansa Islami

² M. Yasin Kalin, *The Implications of EU Admittance of Turkey on TURKISH-EU RELATIONS and TURKISH-U.S. RELATIONS*, Pennsylvania : U.S. Army War College, 2005, hal. 8-13.

³ Emiliano Alessandri, *The New Turkish Foreign Policy and the Future of Turkey-EU Relations*, Istituto Affari Internazionali, 2005, hal.7.

ingin dikembalikan ke dalam masyarakat Turki dan kebijakan luar negeri yang tidak lagi hanya berpusat dan terfokus pada negara Barat .

Kebijakan luar negeri Turki pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan membawa perubahan terhadap hubungan Turki dan Uni Eropa. Kebijakan luar negeri tersebut didasari dari sebuah doktrin yang disebut “*strategic depth*” yaitu strategi yang dibuat oleh menteri luar negeri Turki Ahmet Davutoglu yang menyatakan Turki memiliki posisi geopolitik yang strategis sehingga bisa menjadi aktor penting didalam politik global.

Kebijakan Luar Negeri Turki pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan lahir di Istanbul pada tanggal 26 Februari 1954 yang merupakan pimpinan dari partai *Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)*. Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri selama dua periode setelah memenangkan pemilu pada tahun 2002 dan 2007.

Perubahan perpolitikan Turki mulai terjadi pada masa kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dikuasai oleh partai Keadilan dan Pembangunan Turki. Partai *Adalet ve Kalkinme Partisi* yang lahir dari sintesis gerakan islam di Turki telah berhasil membentuk kesan partai islam (kanan) yang religius namun tetap moderat serta menjunjung tinggi demokrasi.⁴ Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan dan *Adalet ve Kalkinme Partisi* ini jauh berbeda dengan beberapa pendahulunya dari partai (Refah dan MSP) yang berasaskan islam juga tetapi menolak hubungan dengan Barat serta berorientasi untuk menolak agenda Barat, *Adalet ve Kalkinme Partisi* dan Erdogan sebaliknya mampu membina hubungan yang baik dengan Barat terutama beberapa anggota Uni Eropa dan disaat yang sama Turki juga membina hubungan yang semakin erat dengan beberapa negara dari kawasan lainnya , terutama Timur Tengah, Asia Tengah, Kaukasus dan Balkan.

Kebijakan luar negeri Turki pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan memang tidak bisa dilepaskan dari peranan konseptor yang juga Menteri Luar Negeri Turki yaitu Profesor Ahmet Davutoglu yang berusaha untuk meningkatkan peranan politik luar negeri Turki sebagai jembatan atau penghubung antara Asia dan Eropa serta Islam dan Barat. Davutoglu menciptakan doktrin *Strategic Depth* atau strategi mendalam yaitu memanfaatkan kelebihan Turki baik secara Geografi, budaya serta pengaruh sejarah sebagai alat Turki dalam berinteraksi didalam kancah dunia Internasional⁵ yang pada prinsipnya terdiri atas beberapa pendekatan:

1. Posisi Strategis Geografi⁶ Turki yang menjadi jalur penghubung antara Eropa dan Asia serta antara Dunia Barat dan Dunia Islam,

⁴ Ali Carkoglu dan Ersin Kalaycioglu, *The Rising Tide of Conservatism in Turkey*, Palgrave Macmillan, 2009. hlm. 34.

⁵ Burhanettin Duran, 'JDP and Foreign Policy as an Agent of Transformation', in M. Hakan Yavuz, *The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti* (Salt Lake City UT, University of Utah Press, 2006), hlm. 293.

⁶ Dalam studi kajian kajian Geo-Strategis, factor yang menentukan sebagai kekuatan Geografi itu ada 4: 1. *Climate Condition* (kondisi Cuaca), 2. *Location* (lokasi), 3. *Raw Materials* (sumber daya

2. Pentingnya menggunakan ikatan sejarah dan kebudayaan yang kuat antara Turki dengan negara-negara di kawasan Balkan, Timur Tengah dan Asia Tengah.⁷

Hubungan ini menjadi kekuatan strategis Turki untuk menjadi kekuatan Regional dan Doktrin ini juga menghendaki agar Turki juga membina hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan lain serta menciptakan posisi mitra strategis yang seimbang dan menciptakan pola kebijakan luar negeri ini yang tidak hanya berorientasi pada satu kutub tapi lebih kepada bebas untuk menentukan pola kebijakan luar negerinya dan berusaha untuk memperluas pengaruhnya dimana saja.⁸

Davutoglu dalam tulisan terbarunya tahun 2010 mengatakan bahwa Kebijakan Luar Negeri Turki akan didasarkan dalam memenuhi dan menjawab tantangan dunia internasional kedepannya dan dalam rangka tujuan Turki memperluas pengaruhnya di kawasan dan secara global. Dalam prinsip politik luar negerinya Turki akan bersikap sebagai pemain yang Rasional (*Rational Actor*) dan tetap mengedepankan nilai-nilai universal seperti Demokrasi, HAM, perang terhadap kemiskinan, dan lain-lain, dan strategi utamanya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Dari sudut pandang yang strategis, Turki berusaha menciptakan kondisi diplomasi yang pro-aktif dengan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, stabilitas keamanan dengan negara-negara tetangga di kawasan Balkan, Kaukasus, Laut Kaspia, Laut Hitam, Mediterania Timur dan Timur Tengah (dari Teluk sampai Afrika Utara) dengan keinginan politik yang tinggi untuk menjadi bagian dari negara-negara di kawasan tersebut dan terus meningkatkan koordinasi tujuan utamanya adalah menghentikan kemiskinan dan konflik di kawasan-kawasan tersebut dan menggantinya kesejahteraan serta kerja sama atau perdamaian.
2. Turki akan menggunakan identitas multiplisitasnya di kawasan dan menggunakan kondisi strategis tersebut sebagai acuan politik luar negerinya yang terintegrasi dan multidimensi, kondisi Turki yang unik baik secara sejarah dan geografinya membawa tanggung jawab bagi Turki untuk menciptakan resolusi konflik dan perdamaian di kawasan dan global.

Davutoglu lebih lanjut menjelaskan melihat orientasi dan kepentingan luar negeri Turki yang semakin luas dengan melewati aspek posisi geografi, Organisasi dan Permasalahan-permasalahannya tanpa merubah prioritas fundamentalnya (bergabung dengan Uni Eropa) maka politik luar negeri Turki pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan terdiri atas 4 pilar utama yaitu *zero problems with neighbours* (nol masalah dengan negara tetangga), *outreach to adjacent regions* (menjangkau wilayah-wilayah yang berdekatan), *multi-*

alam) dan 4. *Size* (ukuran), Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, terj. Wawan Juanda, Putra Abardin, hlm. 78-80.

⁷ Alexander Murinson, "*The Strategic Depth Doctrine in Turkish Foreign Policy*", *Middle eastern Studies*, 2006, hlm. 945

⁸ Angel Rabasa dan F. Stephen Larrabee, *Op Cit* 76.

dimensional foreign policy (Kebijakan Luar Negeri yang multi dimensi) dan *rhythmic diplomacy* (Diplomasi Berirama).⁹

1. *Zero Problems with Neighbours* (Nol Masalah Dengan Negara Tetangga)

Davutoglu percaya bahwa dalam rangka untuk mendapatkan tempat yang layak di arena politik dunia, Turki harus mengikuti beberapa manner dalam berperilaku politik, yaitu: Rekonsiliasi dengan semua tetangga untuk mengamankan integritas teritorial Turki, terutama di timur dan tenggara. Turki telah mendapat keuntungan dengan penerapan “*Zero Problems with Neighbours*” karena telah berhasil membangun kembali kemitraan ekonomi, militer dan politik yang besar dengan Suriah dan Iran, dan telah didirikan kembali lama hilangnya hubungan diplomatik dengan Armenia, membantu rekonstruksi di Irak dan secara resmi diakui Kurdistan provinsi Irak Utara. Perkembangan dalam kembali diperbolehkan Turki untuk dilihat sebagai sekutu yang dapat dipercaya baik untuk Barat dan Timur.

2. *Outreach to adjacent regions* (Menjangkau Wilayah Yang Berdekatan)

Prinsip kedua Davutoglu adalah mengembangkan hubungan dengan tetangga dekat Turki. Turki telah berpendapat bahwa dampak regional telah meluas ke Balkan, Timur Tengah, Kaukasus dan Asia Tengah. Oleh karena itu, aktif di Balkan melalui partisipasi dalam misi NATO, di Timur Tengah melalui keterlibatan erat dalam rekonstruksi Libanon serta hak-hak Palestina dan di Asia Tengah melalui proyek-proyek pipa energi, telah mengembangkan pengaruh Turki.¹⁰ keterlibatan yang erat dengan daerah yang berdekatan dan membangun *soft power* adalah sangat penting menurut Davutoglu yang mengklaim bahwa:

“hari ini, kita tahu bahwa hanya negara yang pengaruh melintasi perbatasan mereka menggunakan ‘*soft power*’ benar-benar dapat melindungi diri mereka sendiri.”¹¹

3. *Multi-dimensional Foreign Policy* (Kebijakan Luar Negeri yang multi dimensi)

Prinsip ketiga adalah kepatuhan terhadap kebijakan multi-dimensi asing. Prinsip ini memerlukan keterlibatan dalam saling melengkapi dan bukan hubungan kompetitif dengan kekuatan global dengan menerapkan pendekatan yang berbeda dalam setiap masalah, mempertimbangkan harapan dan aturan yang ada dalam diplomasi internasional. Dalam hal ini, Davutoglu

⁹ *ibid*

¹⁰ W. Joshua Walker Insight Turkey, Learning Strategic Depth: Implications of Turkey’s New Foreign Policy Doctrine, July 2007, diakses dari http://files.setav.org/uploads/Pdf/insight_turkey_vol_9_no_3_2007_joshua_walker.pdf 5 Mei 2013

¹¹ *ibid*

menggarisbawahi hubungan strategis Turki dengan AS melalui hubungan bilateral kedua negara dan melalui NATO, dan proses aksesinya Turki ke Uni Eropa, baik lingkungan kebijakannya dengan Rusia, dan kebijakan sinkronisasi di Eurasia menjadi bagian integral dan saling melengkapi dalam konsistensi kebijakan.¹²

4. *Rhythmic Diplomacy* (Diplomasi Berirama).

Prinsip terakhir adalah diplomasi berirama. Turki telah menyelenggarakan pertemuan internasional penting saat mengejar bidang diplomasi dengan kedua aktor negara dan non-negara termasuk Hamas. Sejak tahun 2003 Turki telah menyelenggarakan pertemuan puncak NATO, puncak (Organisasi Konferensi Islam) OKI, Forum Air Dunia di tahun 2009. Ini merupakan peningkatan aktivitas memberikan kontribusi kepada Turki untuk terpilih sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2009, memberikan bobot republik yang lebih dalam mengejar tujuan-tujuan kebijakan luar negerinya.

Kebijakan Recep Tayyip Erdogan terhadap Uni Eropa

Ali Resul Usul dalam bukunya yang berjudul *The Justice and Development Party and European Union* mengatakan bahwa politik luar negeri Turki dan Uni Eropa pada masa Pemerintahan sebelum dan selama Recep Tayyip Erdogan terbagi kedalam 3 periode, yaitu masa *Euro-Skepticism*, *Euro-Enthusiasm*, dan *Euro-Fatigue*.¹³

Pemerintah Turki pada masa Recep Tayyip Erdogan tetap berusaha untuk bergabung kedalam Uni Eropa untuk menciptakan perdamaian dikawasan dan didunia serta juga ikut serta didalam organisasi internasional lain seperti G-20, NATO, dan OKI (Organisasi Konferensi Islam) akan tetapi dalam prosesnya kemudian hambatan yang dialami Turki untuk bisa bergabung kedalam Uni Eropa semakin sulit. Pemerintah Turki berkomitmen kuat untuk melanjutkan proses agenda reformasi untuk menyesuaikan regulasi Uni Eropa dan kemudian Turki juga menghendaki agar Uni Eropa menjaga komitmen dan kredibilitas konsistensinya dalam negosiasi yang telah disepakati, Turki menuntut 3 hal:

1. Uni Eropa harus berjalan kesepakatan sesuai dengan *pacta sunt servanda*,¹⁴
2. Uni Eropa harus tidak mengijinkan permasalahan bilateral Turki menjadi penghambat negosiasi Aksesinya dengan Uni Eropa, dan
3. tidak membiarkan Proses Aksesinya Turki dimanipulasi untuk politik dalam negeri.¹⁵

¹² *ibid*

¹³ Ali Resul Usul, *The Justice and Development Party and the European Union*, Routledge Studies in Middle Eastern Politics, 2008, hlm.175-190

¹⁴ Prinsip dimana pihak-pihak yang bersepakat bernaung dan harus melaksanakan prinsip-prinsip yang telah disepakati, G.R.Berridge and Alan James, *Op Cit* 179.

¹⁵ Ahmet Davutoglu, *Op Cit* 16.

Pemerintah Turki berharap agar usaha yang telah dilakukan Turki selama ini mampu menjadi pertimbangan utama para petinggi Uni Eropa sehingga bersedia membuka dengan segera negosiasi bergabungnya Turki ke Uni Eropa.

Recep Tayyip Erdogan dalam usahanya untuk membuat Turki agar bisa bergabung dengan Uni Eropa adalah mengunjungi setiap ibukota negara anggota Uni Eropa dan mendapatkan dukungan dari beberapa pemimpin di Italia, Yunani, Spanyol, Inggris dan Belgia bahkan termasuk Presiden Amerika Serikat saat itu George W. Bush, namun mendapat tanggapan yang rendah dari para pemimpin di negara Jerman dan Perancis. Melihat kemajuan yang telah dicapai oleh Turki selama ini maka Dewan Eropa ada saat itu memutuskan untuk meninjau permohonan keanggotaan Turki dalam jangka 2 tahun, melihat kondisi ini Perdana Menteri Menteri Recep Tayyip Erdogan berani menyatakan bahwa ini adalah sukses nasional bagi Turki tetapi pada kenyataannya kemudian Uni Eropa menunda lagi keanggotaan Turki.¹⁶

Pada tahun 2003 pemerintahan Turki melakukan proses lebih melangkah ke depan lagi dengan melakukan reformasi demokrasi untuk meliberalisasikan perpolitikan di Turki dan partai *Adalet ve Kalkinme Partisi* dengan menggunakan kekuatannya di Parlemen untuk mempercepat proses ini melihat kondisi Komisioner dari Komisi perluasan Uni Eropa memberikan sambutan yang positif demikian juga dari pemerintahan Yunani, Inggris dan Italia¹⁷. Pada pertengahan 2003 kemudian muncul beberapa penolakan terhadap seluruh prinsip Akses Turki kedalam Uni Eropa dari beberapa negara anggota Uni Eropa terutama dari negara-negara yang dipimpin dari partai konserfativ dan kanan antara lain penolakan dari Kanselor Austria Wolfgang Schussel, kemudian dari penolakan dari Kanselor Jerman Angela Merkel yang juga pemimpin partai demokratik Kristen Jerman dan hanya menyarankan untuk menawari Turki sebuah *partnership* khusus saja, dalam kata lain Jerman hanya menyetujui Intergrasi Turki kedalam Uni Eropa dibidang Ekonomi saja melalui *Customs Union* dan di Perancis pun terjadi penolakan yang sama dari partai pemenang pemilu saat itu yaitu *UMP Party (Union pour un mouvement populaire)*¹⁸.

Hubungan Turki dan Uni Eropa menjadi lebih rumit pada tahun 2004 karena masih belum berakhirnya perselisihan mengenai Siprus. Konflik Siprus diawali dengan kegagalan junta Yunani dalam menguasai keseluruhan pulau tersebut pada tahun 1974 dan hanya mampu bertahan dikawasan selatan yang kemudian memprovokasi okupasi dari pasukan Turki disebelah utaranya yang kemudian mendirikan *Turkish Republic of Norther Cyprus (TRNC)* pada tahun 1983, dalam perjalanannya tidak ada yang mengakui negara Siprus Utara kecuali Turki saja dan menolak kedaulatan Siprus Selatan yang dibawah perlindungan Yunani dan negosiasi permasalahan ini tidak pernah berakhir sehingga pemerintahan Recep berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera jika bisa karena telah menghambat proses bergabungnya Turki ke Uni Eropa, dan kondisi ini semakin menuju sulit setelah Uni Eropa menerima keanggotaan Siprus Selatan pada tahun 2004 yang tentu mendapat penolakan

¹⁶ William Hale and Ergun Ozbudun, *Op Cit* 122.

¹⁷ *Briefing* (majalah mingguan Ankara) 4 Agustus 2003, hlm. 3

¹⁸ William Hale and Ergun Ozbudun, *Op Cit*, hlm. 122.

keras dari Turki, fasilitas dari PBB pun tidak berhasil untuk reunifikasi kedua kedaulatan satu pulau ini, namun kedua negara ini tetap menjaga kondisi yang harmonis dan tidak mau membuatnya menjadi konflik yang lebih tajam. Pihak Yunani dan Turki menganggap bahwa hubungan keduanya akan lebih aman jika berada didalam Uni Eropa dibanding diluar.¹⁹

Tahun 2007 hubungan Turki dan Uni Eropa pun tidak mengalami perubahan yang berarti, bahkan Presiden Perancis yang terbaru Nicolas Sarkozy memutuskan untuk tidak memberikan hubungan yang khusus walaupun Turki tidak menjadi anggota Uni Eropa dan juga membatalkan diskusi mengenai pembahasan prinsip dasar (*Acquis*) Uni Eropa yang akan diterapkan pada Turki, dan tentu ini membuat posisi Turki semakin sulit serta pesimis, didalam negeri Turki terjadi proses yang menurut Uni Eropa sangat lambat dalam reformasi politiknya, kemenangan partai *Adalet ve Kalkinme Partisi* pada tahun 2007 serta mayoritas parlemen yang diisi oleh kelompok kanan membuat kekhawatiran bagi Uni Eropa terutama adanya instabilitas politik internal mengingat seringnya terjadi kudeta antara kelompok militer (sekuler) dan kanan (islam), walaupun anggapan ini tidak terbukti dengan tetap stabilnya pemerintahan yang tetap dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menteri dan Abdullah Gul sebagai Presiden Turki²⁰, dan melihat ini Dewan Uni Eropa pun menyambut baik dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Turki telah berhasil membuat resolusi krisis politik dan konstitusi di Turki melalui proses Demokrasi dan ketentuan hukum tetapi dilain pihak tetap mengingatkan Turki bahwa belum adanya kemajuan mengenai permasalahan Siprus.

Pada tahun 2008 walaupun polemik kembali terjadi di dalam negeri Turki, namun pembahasan dan negosiasi dengan Uni Eropa tetap dilakukan antara lain pembahasan mengenai 6 kesepakatan tambahan terutama mengenai Energi, Hubungan Eksternal dan Keamanan serta Pertahanan yang juga melibatkan perancis disini, akan tetapi memasuki tahun 2009 Turki kembali melakukan kritik terhadap Uni Eropa terkait kesimpulan pelaporan tahunan mengenai perkembangan Turki oleh Komisi Uni Eropa yang menyatakan bahwa Turki masih belum melaksanakan secara utuh kewajiban-kewajibannya terhadap pengentian sikap diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan belum melakukan kemajuan normalisasi hubungannya dengan Republik Siprus (Siprus Selatan)²¹.

Laporan komisi Uni Eropa mengenai Turki pada tahun 2009 dan 2010 masih belum melakukan kemajuan yang signifikan, proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Turki pada dua tahun terakhir menjadi lebih lambat²². Perdana Menteri Turki menyatakan bahwa Uni Eropa sengaja menciptakan beberapa rintangan terhadap Turki yang tidak berlakukan untuk negara lain, namun baik

¹⁹ James Ker-Lindsay, 'The Policies of Greece and Cyprus towards Turkey's EU Accession', *Turkish Studies*, Vol. 8 No.1 (2007) pp. Hlm.74-76, hlm. 79-80.

²⁰ Vincent Morelli dan Carol Migdalovitz, *European Union Enlargement: A Status Report on Turkey's Accession Negotiations*, CRS Report RS22517, 2009, hlm. 8.

²¹ Comission staff working document, Turkey 2008 Progress Report.

²² Ibid.

Perdana Menteri Recep dan Presiden Abdullah Gul tetap menjaga komitmen mereka untuk membuat Turki bisa bergabung ke dalam Uni Eropa.

Dampak Kebijakan Luar Negeri Turki pada Masa Lalu (Masalah Siprus)

Siprus terletak di Tengah Laut Mediterania yang berbatasan dengan lepas pantai Turki di Utara dan Afrika Utara di Selatan.²³ Wilayah Siprus terbagi menjadi dua wilayah bagian yaitu Siprus-Turki (Wilayah Siprus yang dikuasai Turki) dan Siprus-Yunani (Wilayah Siprus yang dikuasai Yunani. Etnis Turki masuk kewilayah Siprus pada abad ke-16 ketika Kesultanan Ottoman menaklukan Siprus. Etnis Turki merupakan mayoritas kedua setelah Yunani yang menempati pulau Siprus. Pada tahun 1878 pasca perang Rusia-Turki, Ottoman melakukan perundingan dengan Inggris bahwa Siprus menjadi wilayah prokterat Inggris yang mengizinkan Inggris memakai pulau Siprus sebagai pangkalan militer untuk membantu Turki menghadapi Invasi dari Rusia. Pasca Perang Dunia-I dimana Turki dan Inggris menjadi kubu yang berlawanan yang diikuti runtuhnya Kekaisaran Ottoman Siprus menjadi milik negara Inggris sepetuhnya pada tahun 1914.

Kelompok Siprus-Yunani menginginkan Siprus diintegrasikan kepada Yunani sedangkan kelompok Siprus-Turki menuntut agar Siprus diberikan kepada negara Turki atau dengan pilihan lain Siprus dibagi menjadi dua wilayah etnis. Pada 16 Agustus 1960 Inggris dan Siprus mengadakan perundingan yang menghasilkan bahwa Siprus adalah sebuah negara merdeka. Turki menginvasi Siprus tahun 1974 dan menduduki 40% wilayah utara dari pulau tersebut. Pada tahun 1983, Turki mengumumkan kepemilikan atas sebagian pulau tersebut, yang dinyatakan sebagai *Turkish Republic of Northern Cyprus* tetapi kondisi ini hanya diakui oleh negara Turki sendiri. ²⁴

Permasalahan Siprus merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi hubungan antara Turki dan Uni Eropa. Hubungan Turki dan Uni Eropa semakin rumit dengan hadirnya masalah Siprus karena dengan permasalahan ini Turki makin dipersulit untuk masuk ke Uni Eropa terbukti dengan begitu banyaknya pembaharuan atas perbincangan mengenai keinginan bergabungnya Turki ke Uni Eropa dikarenakan permasalahan Siprus ini.

Dampak Kebijakan Luar Negeri RecepTayyip Erdogan bagi Poltik Domestik Turki (Internal)

Pada tahun 2005 diselenggarakan Pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa di Brussel (Belgia) yang membahas negosiasi Akses Turki, pada pertemuan ini pihak Turki diminta untuk menyetujui Perjanjian Tambahan untuk melanjutkan perjanjian *Customs Union* 10 anggota baru termasuk Siprus, jika itu berlaku maka Turki harus membuka wilayah udara dan pelabuhannya untuk Siprus Selatan, dan

²³ http://www.cyprus-maps.com/article_geographical-positioning-of-cyprus-island. diakses 1 mei 2013

²⁴ *Turkey's Invasion of Greek Cyprus*

<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/cyprus2.htm> diakses 5 Mei 2013

hal inilah yang ditolak oleh Turki karena membuka wilayahnya untuk Siprus Selatan sama saja dengan mengakui kedaulatan negara ini secara tidak langsung dan pihak Uni Eropa masih memiliki keraguan terhadap Turki menyangkut adanya perbedaan persepsi mengenai prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan, demokrasi, HAM, kebebasan dan penegakkan hukum.

Dalam kerangka perjanjian di Brussel ini diizinkan untuk melakukan hambatan secara penuh terhadap (*Free Movement of people*) dan dibidang Agrikultur, serta tidak ada pembicaraan dan negosiasi yang pasti mengenai apakah Turki pasti akan diterima atau tidak dan hal inilah yang membuat Turki semakin pesimis melihat kondisi ini karena walaupun Turki sudah berhasil memenuhi seluruh syarat ekonomi dan politik tetap tidak ada jaminan apakah Turki diterima menjadi anggota atau tidak.²⁵

Sikap skeptik Uni Eropa kemudian juga diikuti oleh sikap yang sama dari masyarakat Turki yang pada awal pemerintahan Recep Tayyip Erdogan mayoritas masih setuju untuk bergabung kedalam Uni Eropa namun kondisi kontemporer menunjukkan angka antusiasme yang terus menurun, dan berdampak pada sikap para pemimpin Turki yang pada beberapa kesempatan mengkritik sikap Uni Eropa ini walau tetap berkeinginan untuk membina hubungan yang erat dengan Uni Eropa.

Dampak Kebijakan Luar Negeri Recep Tayyip Erdogan terhadap Uni Eropa

Pada awal pemerintahan Recep Tayyip Erdogan hubungan Turki dan Uni Eropa sempat sangat dekat dengan dibukanya negosiasi aksesinya Turki kedalam Uni Eropa pada pertemuan di Brussel tahun 2004 dan juga disepakatinya perluasan *Custom Unions* dan kriteria khusus bagi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa pada perjanjian *Copenhagen*. Hubungan Turki dan Uni Eropa kembali renggang bahkan stagnan yang diakibatkan oleh beberapa faktor:

1. Tidak diapresiasi usaha Turki dalam memenuhi persyaratan yang dikenakan oleh Uni Eropa walaupun Turki sudah melakukan beberapa reformasi dibidang Ekonomi dan Politik,
2. Komisi Uni Eropa pada tahun 2004 melakukan pelarangan penggunaan Jilbab (simbol agama islam) yang membuat kekecewaan dari kalangan partai *Adalet ve Kalkinme Partisi* dan disaat yang bersamaan sentiment negatif terhadap proses bergabungnya Turki kedalam Uni Eropa juga semakin meningkat dikalangan masyarakat Uni Eropa dan mayoritas tetap menolak Turki sebagai negara anggota Uni Eropa meskipun Turki sudah melakukan Reformasi internal secara penuh.

Akan Tetapi para pemimpin Uni Eropa yang pada awalnya memiliki komitmen kuat untuk membina hubungan Ekonomi yang kuat kemudian mulai mengeluarkan kebijakan yang kontradiksi, bahkan kemudian Uni Eropa menolak untuk melakukan Liberalisasi Perdagangan dengan Turki pada bidang-bidang tertentu seperti *Agriculture* dan membatasi bahkan melarang Pekerja Migran dari Turki untuk berkerja di Uni Eropa. Hal tersebut memicu Turki untuk melakukan

²⁵ William Hale and Ergun Ozbudun, *Op Cit*, hlm. 125

tindakan balasan dengan melarang moda transportasi perdagangan Siprus yang merupakan anggota Uni Eropa untuk memasuki atau melewati kawasan Turki. Turki sudah cukup memenuhi syarat ekonomi Uni Eropa bahkan jika dibandingkan 2 negara yang sudah menjadi anggota Uni Eropa yaitu Bulgaria dan Estonia, Turki masih lebih unggul

Permasalahan Ekonomi tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, faktor Politik lebih kuat mempengaruhi proses kebijakannya kemudian Konflik Turki dan Siprus Selatan yang belum menemukan titik temu, serta banyaknya tuduhan Uni Eropa terhadap Turki atas proses Demokratisasi yang lambat kemudian pelanggaran HAM telah membuat Turki kecewa. Penerapan standar ganda oleh Uni Eropa terhadap Turki baik itu dalam bidang Ekonomi (*Customs Union*) dan bidang politik (proses aksesinya Turki ke Uni Eropa) membuat hubungan yang stagnasi diantara keduanya, belum lagi adanya permasalahan Turki dengan Israel mengenai kasus penyerangan kapal mavi marmara.

Mavi Marmara adalah kapal penumpang sejenis ferry yang dibeli oleh lembaga amal Turki untuk bantuan kemanusiaan. Pada 31 Mei 2010 tentara Israel menyerang Kapal Mavi Marmara yang merupakan kapal yang membawa misi kemanusiaan untuk pengungsi Palestina. Aksi Israel lewat penyerangan Kapal Mavi Marmara melanggar HAM. Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu menyebut serangan Israel sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh negara dan menuntut permintaan maaf Israel segera, penyelidikan yang mendesak, serta tindakan hukum Internasional terhadap otoritas dan pelaku yang bertanggung jawab, dan mengakhiri blokade Gaza. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sidang darurat untuk membahas penyerbuan Israel namun pada kenyataannya PBB tetap tidak bisa menghentikan aksi kebrutalan Israel, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga tidak bisa memberlakukan hukum yang telah ditetapkan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga tidak bisa melakukan pemecatan Israel dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Amerika Serikat dan Uni Eropa yang selama ini dianggap sebagai pionier perjuangan HAM tidak bisa berbuat apa-apa atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel peristiwa ini kemudian berdampak kepada hubungan Turki dengan Barat khususnya Uni Eropa. Dikalangan pemimpin-pemimpin barat yang selama ini dianggap sekulerpun bersikap diskriminasi dan rasis sehingga menolak keanggotaan Turki yang mayoritas beragama Islam untuk masuk kedalam Uni Eropa yang dibentuk dan diisi oleh negara-negara yang mayoritas Kristen.

Dampak Global Kebijakan Luar Negeri Turki pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan

Turki pun secara perlahan mulai membina hubungan yang lebih erat ke negara-negara islam terutama negara-negara yang bergabung kedalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan negara-negara dikawasan lain seperti Russia, China dan negara-negara Amerika Latin terutama pada negara-negara islam. Turki mencoba kembali mencoba untuk menjadi salah satu kekuatan penting yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat muslim dunia dengan berperan aktif dalam membina hubungan kerjasama diplomatis dan ekonomi yang terus meningkat. Hubungan yang baik antara Turki dengan Russia dan beberapa di

negara di timur tengah bisa dilihat dari semakin meningkatnya kerja sama dibidang ekonomi.

Angka total ekspor keseluruhan Turki ke negara-negara kawasan timur tengah pada tahun 2009 sebesar 20% dibanding pada 2004 yang hanya 12,5%, hubungan perdagangan dengan Iran meningkat lebih dari 6 kali lipat mencapai \$7,5 M pada tahun 2007 dan transaksi perdagangan dengan Suriah pun juga meningkat dari \$1,1 M pada tahun 2007 meningkat menjadi \$1,4 M pada tahun 2008.²⁶ Sikap Turki yang akhir-akhir ini lebih dekat ke negara-negara dikawasan lain telah mengkhawatirkan beberapa Pemimpin Uni Eropa dan Amerika Serikat jika seandainya kemudian Turki sama sekali tidak bisa menjadi mitra strategis kelompok negara-negara Barat.

Akan tetapi keinginan kuat Turki untuk bergabung dan membina kerja sama yang lebih erat dan luas kepada Uni Eropa pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan masih tetap ada karena sesuai dari arah dan strategi kebijakan luar negeri Turki yang selalu berusaha untuk membina hubungan yang baik dengan negara dikawasan manapun selama itu menguntungkan bagi Turki, dan dampak lain dari kebijakan luar negeri Turki ini adalah semakin eratnya hubungan luar negeri Turki dengan negara-negara dikawasan Timur Tengah, Balkan serta Asia Tengah khususnya dan Dunia Islam umumnya karena memiliki kesamaan identitas serta semakin meningkatnya peranan dan kekuatan negara-negara dikawasan lain terutama dikawasan Asia yang tentu akan memberikan kontribusi positif bagi Turki.

Simpulan

Strategi dan orientasi kebijakan luar negeri Turki pada masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan apabila dikomparasikan dengan strategi dan orientasi kebijakan luar negeri Pemerintahan di masa sebelumnya yang diisi oleh 2 kekuatan kelompok di Turki:

1. Kelompok Kemalism (sekuler) dimana strategi dan orientasi kebijakan luar negerinya sangat pro-barat dan pragmatis serta menolak segala bentuk pengaruh Agama dalam Strategi dan Kebijakan negara.
2. kelompok Islam, strategi dan kebijakan luar negerinya sangat Pan-Islamisme yaitu membinahubungan yang sangat erat dengan negara-negara Muslim serta tidak terlalu antusias bahkan menolak untuk membina hubungan dan kerja sama yang erat dengan barat (Amerika Serikat dan Uni Eropa) serta sangat keras menolak hubungan luar negeri dengan Israel, kelompok ini menganggap Agama Islam adalah prinsip berkenegaraan yang harus ditegakkan dan digunakan oleh Turki.

Turki pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan, dalam strategi dan orientasi kebijakan luar negerinya bersikap moderat dan rasional, Turki pada masa Pemerintahannya membina hubungan yang erat baik dengan Barat dan juga

²⁶ Ivan Krastev & Mark Leonard, *the Spectre of a Multipolar Europe*, the European Council on Foreign Relations (ECFR), 35 Old Queen Street, London SW1H 9JA, 2010, hlm.49.

negara-negara Islam, Strategi kebijakan Luar Negeri Turki seperti ini sangat menguntungkan bagi Turki dalam kancah perpolitikan dan membuat posisi Turki menjadi salah satu kekuatan yang strategis karena bisa menjembatani dan membina hubungan baik dengan dunia Barat dan dunia Islam sekaligus. Turki pada masa pemerintahan Recep Tayib Erdogan dalam kebijakan domestiknya pun sangat moderat, Turki pada masa pemerintahannya mampu mengharmonisasikan prinsip-prinsip Islam kedalam bentuk nasionalisme kebangsaan.

Perubahan kondisi domestik dan kebijakan luar negeri Turki tetap menimbulkan kekhawatiran dipihak Uni-Eropa walaupun dalam berbagai *statement* dan strategi kebijakan dalam dan luar negeri Turki tetap berkomitmen kuat untuk membina hubungan yang erat dengan pihak Barat terutama Uni Eropa serta mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh Uni Eropa agar bisa bergabung kedalam bagian negara-negara Uni Eropa, akan tetapi sikap skeptik tetap saja masih ada, yang tidak hanya ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Uni Eropa tetapi juga mayoritas masyarakat Uni Eropa juga enggan untuk menerima Turki kedalam bagian Uni Eropa, sikap ini berdampak kemudian pada kebijakan Uni Eropa yang terkesan bersikap *cooperative* akan tetapi selalu menunda-nunda proses negosiasi untuk Akses Turki dan mengurangi hak-hak istimewa yang disepakati didalam kesepakatan *Customs Union*.

Daftar Pustaka:

BUKU:

- Ahmet Davutoglu. 2008. *'Turkey's Foreign Policy Vision: an Assessment of 2007'*, *Insight Turkey*, Vol. 10, No.1.
- Al Carko Lu Barry Rubin. 2003. *Turkey and the European Union: Domestic politics, Economic Intergration and international Dynamics*, Frank Cass London, Portland.
- Alexander Murinson. 2006. "The Strategic Depth Doctrine in Turkish Foreign Policy", *Middle eastern Studies*.
- Ali Resul Usul. 2008. *The Justice and Development Party and the European Union*, *Routledge Studies in Middle Eastern Politics*.
- Angel Rabasa dan F. Stephen Larrabee. 2008. *The Rise of political Islam in Turkey*, RAND Institute.
- Jack C. Plano dan Roy Olton. 1996. *Kamus Hubungan Internasional*, terj. Wawan Juanda, Putra Abardin
- James Ker-Lindsay. 2007. *'The Policies of Greece and Cyprus towards Turkey'S EU Accession'*, *Turkish Studies*, Vol. 8 No.1.
- Syarif Taghian. 2012. *Erdogan:Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki* Jakarta:Pustaka Al-Kautsar
- William Hale and Ergun Ozbudun. 2009. *Islamism, Democracy and Liberalism in Turkey : The case of the AKP*, Roulledge, London and New York.

ARTIKEL:

- Adam Balcer. 2009. „*Heading for the Strategic Partnership EU-Turkey in the Foreign Policy*. Warsaw: demoseUROPA
- Emiliano Alessandri. 2010. *The New Turkish Foreign Policy and the Future of Turkey-EU Relations*. Istituto Affari Internazionali.
- EU Commission. 2000. *Agenda 2000 – Vol. I: For a stronger and wider Union; Vol. II: The challenge of enlargement*, COM/97/2000 final, Vol.I/Vol.II.
- Ivan Krastev & Mark Leonard. 2010. *The Spectre of a Multipolar Europe*. London: the European Council on Foreign Relations
- M. Yasin Kalin. 2005. *The Implications of EU Admittance of Turkey on TURKISH-EU RELATIONS and TURKISH-U.S. RELATIONS*. U.S. Army.

SITUS INTERNET:

- W. Joshua Walker Insight Turkey, *Learning Strategic Depth: Implications of Turkey's New Foreign Policy Doctrine, July 2007*
http://files.setav.org/uploads/Pdf/insight_turkey_vol_9_no_3_2007_joshua_walker.pdf
- Turkey's Invasion of Greek Cyprus
<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/cyprus2.htm>